

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat : Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta
- Amiruddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan di Indonesia)*, Prestasi Pustakarya, Jakarta
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Pranada Media Group: Jakarta.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanny*, Djambatan, Jakarta
-1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi, Djambatan, Jakarta
- Dominikus Rato, 2015, *Hukum Adat Kontemporer*, LaksBang Justitia, Surabaya
-2014, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Elly M. Setiadi, 2006, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Fredrik Barth, 1988, *Kelompok Etnik dan batasannya*, UI-Press, Jakarta
- Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhamadyah University Press. Surakarta
- I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung



ah, 2021, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan rtikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristram Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta

J.C.T, et al., 2006, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Bukum Kompas, Jakarta

.....2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, KOMPAS, Jakarta

Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Maria S.W. Sumardjono, 2006, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta

Nuraedah, 2019, *Kebudayaan dan Perubahan Sosial Etnis Tori Bunggu*, CV Budi Utama, Yogyakarta

Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan Halim, 1984, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta

.....2011, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Putu Oka Ngakan, et.al., 2005, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*, CIFOR, Bogor.

Rosdalina, 2011, *Hukum Adat*, Deepublish Publisher, Yogyakarta

R. Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung

Soerojo Wignjodipoero, 1973, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung,

Sambiring Rosnidar, 2007, *Hukum Pertanahan Adat*. Depok, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Sudikno Mertokusumo dan Urip Santoso, 2006, *Hukum Agraria Hak-hak atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta



Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

.2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta

W.J.S Peowadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perkebunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

JURNAL/KARYA ILMIAH

Achmad, Isyrofah Amaliyah, dkk. 2020. *Kewenangan Hak Menguasai Negara Atas Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan Lindung*. Jurnal; *umatara Law Review*, Volume 3, Nomor 1



- Hesty Hastuti, 2000, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia.
- Husein Alting, 2011, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini, dan masa mendatang)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Ismi, Hayatul. 2017. *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*. Forum Kerakyatan
- J. B. Daliyo, et al., 2002, *Eksistensi Hak Masyarakat Adat Atas Tanah setelah Berlakunya UUPA*, Justitia Ex Pax, Jurnal, Vol. 22, No. 2, Desember 2002, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
- Jawahir Tontowi, 2020, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan HakHak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta Vol. 10
- Muhammad Ilham Arisaputra dan Sri Wildan Alnun Mardiah, 2019, *Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam pengembangan administrasi Pertanahan di Indonesia*; Studi Komparatif, Jurnal Amanna Gappa Vol. 27
- Muchsin, 2006, *Kedudukan Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*, Varia Peradilan, XXI, Ikahi, Jakarta.
- Syuryani, 2016, *Eksistensi Hal Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi*, Menara Ilmu Vol. X Jilid 2 No.73
- Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta
- Teddy Anggoro, 2008, *Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 36 Nomor 4, Jakarta.



WAWANCARA

Aso M	(Kepala Desa Pakawa)
Panggo	(Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu)
Muhammad Asgaf	(Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat)
Mulyadi	(Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu)

WEBSITE

<https://nasional.kompas.com/read>.

Anonym, www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum.

https://sulbarkita.com/bunggu_suku_berumah_pohon_di_mamuju_utara.

<https://nasional.kompas.com/read/2011/01/22/0807221/~Oase~Cakrawala>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasangkayu.



LAMPIRAN





Optimized using
trial version
www.balesio.com



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rongas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91512
email : dishut@sulbarprov.go.id, website : <http://www.dishut.sulbarprov.go.id>

Mamuju, 28 Agustus 2023

Nomor : 500.4.3/255/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Herianto. M
Tempat tanggal lahir : Rantepao, 21 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi Selatan,
Kec. Kalukku, Kab. Mamuju.

Benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data pendukung di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penyusunan tesis dengan judul **"EKSISTENSI TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU BUNGGU DI DESA PAKAWA, KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT"**.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Tata Guna
Dan Pemanfaatan Hutan,



BUDIMAN SAID, S.Hut.
Pembina TK.II/(IV.b)
NIP.1975031819941004



en ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ir. Soekarno . KM. 732 Pasangkayu, Kode Pos 91571

SURAT KETERANGAN
Nomor: 180/315/HUKUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyadi, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pasangkayu
Alamat Kantor : Jl. Ir. Soekarno. KM. 732 Pasangkayu

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa (S2) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, atas:

Nama : Herianto. M
NIM : B022192029
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan.

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara, pengambilan data dan informasi dalam kegiatan penelitian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk menyusun tesis dengan judul **"Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu di Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat"**. Terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan 8 September 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasangkayu, 11 September 2023
Kepala Bagian Hukum,


MULYADI, S.H.
Np.19791115 200804 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
KECAMATAN PASANGKAYU**

Jalan Moh. Hatta Pasangkayu, Kode Pos 91571

SURAT KETERANGAN

Nomor : 137/89/VIII/2023/KP

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Pasangkayu menerangkan bahwa:

Nama : Herianto. M
Tempat tanggal lahir : Rantepao, 21 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi Selatan,
Kec. Kalukku, Kab. Mamuju.

Benar telah mengadakan penelitian di wilayah kerja kami dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "EKSISTENSI TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU BUNGGU DI DESA PAKAWA, KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT".

Selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 08 Agustus s/d 08 September 2023.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu

Pada Tanggal : 11 September 2023

Camat Pasangkayu,



IRWAN LASIBE, S.Sos

Pangkat : Pembina

Nip : 19791115 200804 1 001





**PEMERINTAH DESA PAKAVA
KEC. PASANGKAYU, KAB. PASANGKAYU**

Jalan Desa Pakava, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Kode Pos 91579

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460/05-SUKET/IX/2023/DP

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pakava menerangkan bahwa:

Nama : Herianto. M
Tempat tanggal lahir : Rantepao, 21 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi Selatan,
Kec. Kalukku, Kab. Mamuju.

Benar telah mengadakan penelitian di wilayah kerja kami dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "EKSISTENSI TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU BUNGGU DI DESA PAKAWA, KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT".

Selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 08 Agustus s/d 08 September 2023.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Pakava
Pada Tanggal : 11 September 2023

Kepala Desa Pakava,



Dokumentasi Penelitian



Keterangan : Kantor Bupati Kabupaten Pasangkayu



Keterangan : Wawancara dengan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu (Mulyadi, SH)





*Keterangan : Wawancara dengan Kasubag Perencanaan
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
(Muhammad. Asgaf, S.Hut,. M.P)*



Keterangan : Wawancara dengan Kepala Desa Pakawa (Aso M.)





Keterangan : Wawancara dengan To Tua / Ketua Adat Suku Bunggu (Panggo)

